

# Pemetaan Wacana Syariah dan HAM dalam Penulisan Tesis Mahasiswa

**Mansur**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

E-mail: [mansur@uin-suka.ac.id](mailto:mansur@uin-suka.ac.id)

**Siti Jahroh**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

E-mail: [siti.jahroh@uin-suka.ac.id](mailto:siti.jahroh@uin-suka.ac.id)

**Mochamad Nadif Nasruloh**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

E-mail: [mochamad.nadif.nasruloh@student.uin-suka.ac.id](mailto:mochamad.nadif.nasruloh@student.uin-suka.ac.id)

**Abstract:** The existence of the study of sharia sciences in universities can be a barometer of how sharia sciences have been conceptually developed and have dynamically responded to developments and societal demands. That is why it is important to continue to pay close attention to the teaching and learning process of sharia sciences in higher education, for example through in-depth studies of trend maps of sharia discourse and human rights (human rights) in student thesis writing. The Sharia Science Master's Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is one of the many study programs whose learning focuses on the study of sharia sciences. There are three academic problems that are the focus of this paper's study, namely (1) what discourses tend to be the tendencies of students in the Sharia Science Master's Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in writing their theses from 2016 to 2020, (2) Is there any relevance of the choice of discourse tendencies in writing the student's thesis to the competence of the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, and (3) is there a correlation between the understanding of scientific theory of students in the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta with the choice of discourse tendencies in writing their thesis, especially related to human rights discourse. The results of the search for student thesis data for 2016-2020, Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, show that the tendencies of sharia and human rights discourse in students' thesis writing vary greatly according to the scope of each concentration. There

are, namely Islamic family law, sharia economic/business law, and constitutional law. However, there are still several theses studies that only repeat the themes of previous studies. In contrast to case studies and field studies, character studies still seem to be minimal in the trend of writing theses for students of the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. In fact, studying figures and their thoughts in the field of sharia and human rights studies is very important for the development of sharia science itself. This is closely related to theoretical understanding related to the special skills aspects of students in the Master of Sharia Science Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, which still need to be improved in the future.

**Keywords:** *Discourse, Sharia, Human Rights, Thesis*

**Abstrak:** Adanya kajian ilmu-ilmu syariah di perguruan tinggi dapat menjadi salah satu barometer tentang bagaimana ilmu-ilmu syariah itu secara konseptual telah dikembangkan dan secara dinamis telah merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Itulah mengapa menjadi penting untuk terus mencermati proses pengajaran dan pembelajaran ilmu-ilmu syariah di perguruan tinggi, misalnya melalui kajian mendalam tentang peta kecenderungan wacana syariah dan HAM (hak asasi manusia) dalam penulisan tesis mahasiswa. Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian program studi yang fokus pembelajarannya seputar kajian ilmu-ilmu syariah. Ada tiga problem akademik yang menjadi fokus kajian tulisan ini, yakni (1) wacana-wacana apa saja yang menjadi kecenderungan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan tesis mereka dari tahun 2016 hingga 2020, (2) adakah relevansi pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut dengan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan (3) adakah korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mereka khususnya terkait dengan wacana HAM. Hasil penelusuran terhadap data-data tesis mahasiswa tahun 2016-2020 Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa kecenderungan wacana syariah dan HAM yang ada dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut sangat beragam sesuai dengan ruang lingkup masing-masing konsentrasi yang ada, yakni hukum keluarga Islam, hukum ekonomi/bisnis syariah, dan hukum tata negara. Namun demikian, masih ditemukannya beberapa kajian tesis yang hanya mengulang tema-tema kajian sebelumnya. Berbeda dengan studi kasus dan studi lapangan, kajian studi tokoh nampaknya masih minim dalam kecenderungan

penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Padahal, studi tokoh dan pemikirannya dalam bidang kajian syariah dan HAM sangatlah penting guna pengembangan ilmu-ilmu syariah itu sendiri. Hal ini terkait erat dengan pemahaman teoritik terkait dengan aspek ketrampilan khusus mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masih perlu ditingkatkan kembali pada masa-masa ke depan.

**Kata Kunci:** *Wacana, Syariah, HAM, Tesis*

## Pendahuluan

Hukum keluarga Islam dewasa ini populer disebut dengan istilah *fiqh al-ahwal asy-syakhsbiyyah*. Istilah tersebut tergolong istilah baru dan tidak begitu dikenal dalam literatur kitab-kitab fikih klasik. Di dalamnya dibicarakan hukum-hukum pernikahan, perceraian, rujuk, waris dan hal-hal lain yang terkait. Jika kita membaca warisan intelektual muslim (baca: kitab-kitab klasik) yang menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan terkait dengan sikap, pandangan dan tingkah laku keberagaman masyarakat muslim termasuk di Indonesia, tampak jelas bahwa masalah-masalah perempuan dalam kajian *al-ahwal asy-syakhsbiyyah* masih sering diposisikan sebagai makhluk subordinat (baca: makhluk kelas dua) di bawah kaum laki-laki. Penempatan perempuan dalam posisi tersebut merupakan bagian dari sistem sosial-budaya patriarkhi. Dalam sistem seperti ini semua keputusan final berkaitan dengan relasi laki-laki-perempuan baik dalam wilayah kerja domestik maupun publik/politik senantiasa berada di tangan kaum laki-laki. Dan karena relasi yang tidak setara ini, maka tingkat *bargaining* (daya tawar) perempuan dalam berbagai hal secara hukum sangat lemah kalau tidak boleh dikatakan tidak berdaya sama sekali.

Saat ini, adanya pembaruan hukum keluarga Islam merupakan langkah yang perlu dilakukan dan niscaya. Tidak ada alasan lain dari langkah ini kecuali didasarkan atas keinginan yang kuat untuk memperlihatkan watak hukum Islam sebagai hukum yang dinamis dan dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam konteks sosial yang senantiasa berubah dan berbeda, tentu dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah tegaknya kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan

manusia. Kemaslahatan dan keadilan disepakati oleh para ulama fikih sebagai tujuan utama hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah al-Islamiyah*).

Karya-karya fikih klasik yang demikian kaya dan memuat beragam pandangan, sesungguhnya memperlihatkan kepada kita bahwa pikiran-pikiran para ahli fikih tersebut disampaikan di dalam rangka menjawab kasus-kasus yang terjadi dalam ruang dan waktunya masing-masing di bawah prinsip-prinsip kemaslahatan sosial. Sulit dipahami bahwa fatwa-fatwa fikih tersebut dimaksudkan oleh pengarangnya (para mujtahid) untuk diberlakukan di seluruh ruang dan sepanjang waktu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan dalam tesis Faruq Abu Zaid yang menyatakan bahwa pandangan fikih para imam mazhab tidak lain kecuali merupakan refleksi sosial, budaya dan politik masing-masing.<sup>1</sup> Dengan demikian, disadari sepenuhnya bahwa produk-produk fikih yang dihasilkan oleh para mujtahid adalah sesuatu yang paling baik, paling maslahat, kontekstual dan relevan untuk ruang dan waktunya sendiri-sendiri.

Keniscayaan adanya perubahan hukum karena konteks sosial yang berubah, dalam catatan sejarah Islam pernah diberikan contohnya oleh sahabat Umar bin al-Khattab untuk sejumlah kasus, termasuk terhadap teks yang jelas dan tegas, misalnya tentang *at-talaq as-salas* (talak tiga). Demikian juga para sahabat yang lain dan imam Syafi'i melalui *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya. Perubahan hukum karena perubahan konteks sosial juga telah diberikan elaborasi secara cukup luas oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, guru Ibnu Katsir dalam karya populernya, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Ia membuat judul besar untuk uraian ini: "*Taghayyur al-Fatwa wa ikhtilafuha bi Hasab Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-Niyat wa al-Awaid*" (Perubahan fatwa dan perbedaannya didasarkan pada pertimbangan perubahan waktu, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat).

Dari paparan di atas, maka adalah sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum tersebut dimaknai sebagai merubah atau mengganti hukum-hukum Tuhan. Syeikh Muhammad Musthafa Syalabi dengan kritis menjawab persoalan ini. Ia mengatakan:

---

<sup>1</sup> Faruq Abu Zaid, *asy-Syari'ah al-Islamiyah baina al-Muhafizhin wa al-Mujaddidin*, (Kairo: Daral-Taufiq al-'Arabi, t.t.), hlm. 16.

”Perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan (terhadap hukum-hukum Tuhan). Adalah tidak mungkin bagi siapa saja betapapun kedudukannya dapat menyetujui pandangan tersebut. Perubahan hukum tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang berubah dan karena kemaslahatannya yang berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan tergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatan itu sendiri”.<sup>2</sup>

Apa yang terjadi adalah sebaliknya, langkah-langkah perubahan tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syari’ah dalam situasi-situasi yang berubah. Syalabi lebih jauh berpandangan tentang kemungkinan adanya perubahan atas hukum yang telah disepati (*ijma’*) manakala hukum tersebut sudah tidak lagi sejalan dengan kemaslahatan umat. Ia mengatakan:

“Saya menyetujui pendapat mereka bahwa memang tidak boleh merubah *ijma’* (konsensus) hanya ketika *ijma’* tersebut benar-benar nyata, disampaikan kepada kita melalui jalan yang benar terhadap suatu hukum yang kemaslahatannya tidak berubah sepanjang masa”.<sup>3</sup>

Pernyataan Syalabi tersebut tentu dapat dipahami bahwa terhadap masalah-masalah yang kemaslahatannya bisa berubah-ubah, *ijma’* tidak selamanya dapat dipertahankan. Dan kita mengetahui dengan pasti bahwa masalah-masalah *al-ahwal asy-syakhsbiyyah* merupakan bagian dari masalah-masalah yang bisa berubah-ubah kemaslahatannya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> MM. Syalabi, *Ta’lil al-Abkam*, hlm. 316.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 327.

<sup>4</sup> Terkait dengan kaidah hukum, ada sejumlah kaidah fikih lain yang memberikan kemungkinan kepada kita untuk melakukan perubahan atas hukum yang ada. Di antaranya adalah *al-hukm yadurru ma’a illatibi wujudan wa ‘adaman* (hukum itu tergantung pada illat/logika rasionalnya), *as-sabit bi al-’urf ka as-sabit bi asy-syar’i* (ketetapan yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang

Kini diakui atau tidak, zaman telah berubah dalam bentuknya yang luar biasa. Tradisi-tradisi juga kini telah berubah. Fakta-fakta sosial menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak lagi berperan dalam urusan-urusan domestik dan juga tidak sekedar mempunyai fungsi reproduksi;<sup>5</sup> mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Kaum perempuan dalam skala yang cukup besar telah terbukti memiliki peran-peran produksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tingkat pendidikan dan intelektualitas mereka juga terbukti tidak selalu berada di bawah laki-laki. Sebagian dari mereka justru melebihi laki-laki. Dengan begitu kita tidak bisa melakukan generalisasi bahwa tingkat dan potensi intelektual semua perempuan lebih rendah dari tingkat dan potensi intelektual semua laki-laki. Demikian juga dengan kemampuan fisiknya. Generalisasi dalam konteks ini sama sekali tidak realistis.<sup>6</sup>

Dengan demikian, menurut Husein Muhammad, adanya reinterpretasi dan reformulasi fikih dalam masalah-masalah hukum keluarga Islam termasuk apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu mendapatkan apresiasi yang serius sehingga kaum perempuan Indonesia mendapatkan hak-haknya secara adil dan

---

didasarkan atas syara') atau *tasharruf al-Imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan publik pemerintah harus didasarkan atas kemaslahatan masyarakat setempat) dan lain-lain. Beberapa kaidah hukum tersebut, dan masih ada sejumlah kaidah hukum lainnya yang senada, menunjukkan kepada kita bahwa teks-teks hukum klasik tidak semata-mata dipahami dari bunyi tekstualnya dan diberlakukan secara final melainkan perlu dianalisis melalui pikiran-pikiran rasional, konteks sosial-ekonomi dan politik yang mengitarinya kemudian menghubungkannya dengan kenyataan-kenyataan empiris kontemporer menyangkut aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik serta tradisi-tradisi baru lainnya yang ada di tengah masyarakat.

<sup>5</sup> Menurut Husein Muhammad, hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Di antara hak-hak reproduksi perempuan adalah hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan (aborsi). Lihat, Husein Muhammad, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam" dalam Tim PSW, *Modul Pelatihan Hak-Hak dalam Keluarga* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan The Asia Foundation, 2009), hlm. 97, 100-105.

<sup>6</sup> Husein Muhammad, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" dalam Tim PSW, *Modul Pelatihan Hak-Hak dalam Keluarga* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan The Asia Foundation, 2009), hlm. 73-74.

dijalankan melalui proses-proses yang demokratis karena pilar utama hukum adalah keadilan. Di sisi lain, pembaruan hukum keluarga Islam perlu ditempuh melalui tiga strategi pendekatan, yakni sosio-kultural, struktural (peraturan perundang-undangan) dan politik.<sup>7</sup>

Paparan di atas menegaskan tentang urgensi dan signifikansi dari keberadaan Program Studi Magister Ilmu Syariah di berbagai perguruan tinggi agama Islam, baik negeri maupun swasta, untuk turut berperan serta dalam melakukan upaya-upaya advokasi, reinterpretasi dan reformulasi kajian hukum Islam (fikih) khususnya dalam masalah-masalah hukum keluarga Islam (*ahwal asy-syakhsbiyyah*), hukum ekonomi/bisnis syariah (*mu'amalah*), dan hukum tata negara (*siyasah syar'iyah*) di Indonesia. Salah satu di antara upaya-upaya yang dimaksud adalah melalui kajian-kajian karya ilmiah mahasiswa jenjang pascasarjana (tesis).

Tulisan ini membahas tentang pemetaan wacana syariah dan HAM dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertimbangan ilmiah atas pilihan subyek kajian ini juga dipertegas dengan adanya visi, misi dan tujuan dari keberadaan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu sendiri.

Kajian syariah dan HAM dalam tulisan ini jika dikaitkan dengan visi, misi dan tujuan dari Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maka menjadi cukup signifikan agar mahasiswa dapat lebih mengembangkan wacana-wacana yang terkait dengan spesialisasi bidangnya (konsentrasi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi/bisnis syariah, dan hukum tata negara) guna menopang peran dan kiprahnya di tengah masyarakat secara luas. Selain itu, adanya kajian ini juga terkait dengan media publikasi ilmiah yang telah dimiliki oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* di mana karya-karya tesis terbaik dapat menjadi kontributor naskah dalam publikasi ilmiah tersebut.

Berangkat dari paparan di atas, maka terdapat tiga permasalahan pokok yang akan dicari jawabannya dalam kajian tulisan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

ini adalah terumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, yakni: (1) wacana-wacana apa saja yang menjadi kecenderungan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan tesis mereka dari tahun 2016 hingga 2020, (2) adakah relevansi pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa dengan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan (3) adakah korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pilihan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mereka tersebut khususnya terkait dengan wacana HAM.

Berdasarkan tiga permasalahan pokok di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah: (1) untuk mengetahui wacana-wacana apa saja yang menjadi kecenderungan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan tesis dari tahun 2016 hingga 2020, (2) untuk mengetahui relevansi kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kaitannyadengan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa dari tahun 2016 hingga 2020, dan (3) untuk mengetahui korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa dari tahun 2016 hingga 2020.

Adapun manfaat yang bisa diuraikan dari adanya kajian ini adalah: (1) adanya pemetaan yang jelas terhadap kecenderungan wacana mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penulisan tesis dari tahu 2016 hingga 2020, (2) sebagai salah satu *barometer* untuk mengetahui ketercapaian kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam kaitannya dengan kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini juga terkait dengan pola bimbingan tesis yang dilakukan oleh para dosen pembimbing tesis mahasiswa, dan (3) dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui korelasi antara pemahaman teori keilmuan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pola penyampaian materi pokok perkuliahan yang disampaikan oleh para dosen pengampu matakuliah.

## Peta Kajian Ilmu-Ilmu Syariah

Terdapat beberapa istilah untuk penyebutan hukum keluarga di kalangan para sarjana hukum. Istilah-istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab yang tercantum dalam kitab-kitab fikih untuk menyebut hukum keluarga Islam, beberapa diantaranya, adalah: *al-Abwâl asy-Syakhsyâh*, *Nidhâm al-Ushrah*, *Huqûq al-Ushrah*, *Abkâm al-Ushrah*, dan *Munâkahât*. Sementara istilah-istilah dalam bahasa Arab yang sering dipergunakan sebagai istilah teknis dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer adalah: *Qanûn al-Abwâl asy-Syakhsyâh*, *Qanûn al-Ushrah*, *Qanûn Huqûq al-Âilatu*, *Abkâm al-Zawâj*, dan *Abkâm al-Izdivâj*. Dalam istilah bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer digunakan istilah-istilah seperti: *Islamic Personal law*; *Islamic Family Law*; *Muslim Family Law*; *Islamic Family Protection*; *Islamic Law of Personal Status*; *Islamic Law of Family Rights*; *Islamic Marriage Law*; dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia digunakan istilah-istilah seperti: hukum perkawinan; hukum keluarga, hukum kekeluargaan, dan hukum perorangan.

Secara umum, cakupan pembahasan yang mengatur tentang hukum dalam kehidupan keluarga, menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (*fuqaha*) dalam kitab-kitab fikih adalah: (1) tata cara meminang; (2) syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang meliputi: akad nikah, wali nikah, saksi dalam perkawinan, dan mempelai laki-laki; (3) mahar; (4) mahram/muhrim; (5) nikah yang sah dan nikah yang tidak sah; (6) poligami; (7) hak dan kewajiban suami dan isteri; (8) nafkah; (9) perceraian; (10) 'iddah; (11) ruju'; (12) hubungan anak dan orang tua; (13) pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*); (14) subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, dan (15) masalah waris, yang meliputi: ahli waris, besarnya bagian, *aul* dan *rad*, serta hibah.

Dengan demikian, secara ringkas cakupan hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih konvensional dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yakni: *pertama*, bahasan yang hanya mencakup 3 pokok bahasan, yaitu: (1) perkawinan, (2) perceraian, dan (3) warisan;

*kedua*, bahasan yang mencakup 4 pokok bahasan, yaitu: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) warisan, dan (4) wakaf; *ketiga*, bahasan yang mencakup 5 pokok bahasan, yaitu: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) warisan, (4) wasiat, dan (5) wakaf; dan *keempat*, bahasan yang mencakup 6 pokok bahasan, yaitu: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) warisan, (4) wasiat, (5) wakaf; dan (6) perwalian.

Amin Summa juga mengelompokkan cakupan hukum keluarga Islam menjadi 4 (empat), tetapi dengan rumusan yang sedikit berbeda, yakni: (1) perkawinan (*munâkabât*); (2) pengasuhan dan pemeliharaan anak (*hadanah*); (3) kewarisan dan wasiat (*al-mawâris wa al-wasâya*); dan (4) perwalian dan pengampunan/pengawasan (*al-walâyah wa al-harf*).

Singkatnya, dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa cakupan hukum keluarga Islam adalah: (1) perkawinan, yang mencakup: peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah); (2) kehidupan rumah tangga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami, istri dan anak, yang berarti masuk pula urusan hubungan orang tua dan anak, poligami, dan nafkah; (3) perceraian, yang berarti proses penyelesaian masalah rumah tangga, yang mencakup: *syiqâq* dan *nusyuz* (percekcokan dan pembangkangan); *kbulu'* dan *talak* (inisiatif untuk cerai, baik dari istri (*kbulu'*) atau suami (*talaq*); dan *'iddah* (masa menunggu) dan *rju'u'* (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisah/cerai); (4) pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadanah*); dan (5) penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, yang mencakup: waris, wasiat, wakaf, dan transaksi penyerahan atau penerimaan lain.

Sementara cakupan hukum keluarga Islam kontemporer (dalam bentuk perundang-undangan) dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori sebagai berikut: (1) perundang-undangan yang hanya mencakup satu unsur saja dari cakupan yang seharusnya dalam kehidupan rumah tangga dan pra-syaratnya, misalnya hanya mengatur pencatatan perkawinan, hanya mengatur masalah mahar; (2) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan; (3) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian; (4) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan warisan; (5) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan,

perceraian, warisan dan wakaf; dan (6) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan perwalian.

Dalam pembuatan hukum keluarga, hukum Islam sangat dominan dijadikan sebagai sumber hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki posisi lebih dibanding hukum-hukum lain di Indonesia. Jika kita menengok kembali catatan sejarah keberadaan hukum Islam terutama hukum keluarga di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Islam Indonesia, karena itulah dikenal teori *Receptio in Complexu*. Lalu hukum Islam mengalami kemunduran yakni hukum Islam baru bisa berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat, dan hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat masing-masing, masa inilah yang kemudian dikenal adanya teori *Receptie*. Setelah melalui perjuangan akhirnya teori ini berbalik menjadi teori *Receptie Exit*, yakni hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ketiga inilah yang sampai saat ini terus mempengaruhi pembentukan hukum nasional terutama di bidang hukum keluarga. Jika dianalisis konflik-konflik hukum itu terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan asasi yang terdapat dalam kedua sistem hukum itu sendiri, yaitu hal-hal yang terkait dengan tujuan, metode penemuan hukum, dan konsep keadilan.

Dalam catatan sejarah, perjuangan lahirnya hukum keluarga Islam Indonesia, dengan sebutan yang lebih populer, Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, memang telah muncul sejak zaman penjajahan. Perjuangan ini berjalan terus sampai sekarang, zaman reformasi. Perjuangan ini mengalami pasang surut; kadang mendapat respon positif dari pemerintah yang berkuasa, kadang kala sebaliknya, tidak mendapat dukungan pemerintah. Demikian juga terhadap materi yang diusulkan untuk diperbarui, sejumlah elemen masyarakat menyetujui untuk diperbarui, tetapi banyak juga yang sebaliknya, tidak menyetujui. Maka pro dan kontra sudah menjadi fenomena umum dalam perjalanan pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia itu sendiri.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci bagaimana sejarah pembaruan hukum keluarga (perkawinan) Islam Indonesia –paling tidak-- ada tiga periodisasi yang bisa kita pergunakan, yakni: *pertama*, masa orde lama (selama masa kekuasaan presiden 1 Indonesia,

Sukarno); *kedua*, masa orde baru (masa kekuasaan presiden 2 Indonesia, Suharto), dan *ketiga*, masa reformasi, yakni sejak jatuhnya Suharto pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang.

### **Kecenderungan Wacana Syariah dan HAM pada Tesis Mahasiswa**

Hasil penelusuran data tesis yang ditulis pada tahun 2016-2020 oleh para mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa kecenderungan wacana syariah dan HAM yang ada dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut sangat beragam sesuai dengan ruang lingkup masing-masing konsentrasi yang ada, yakni konsentrasi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi/bisnis syariah, dan hukum tata negara. Namun demikian, jika ditelaah lebih mendalam dari masing-masing kajian tesis mahasiswa tersebut, maka ada beberapa kecenderungan wacana yang dapat disimpulkan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing kecenderungan wacana dimaksud.

Sepanjang tahun 2016-2020, peta kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi empat kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) gender, dan (4) formulasi hukum keluarga Islam. Berikut adalah data pemetaan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HKI dalam bentuk tabel.<sup>8</sup>

<b>No</b>	<b>Kecenderungan Wacana</b>	<b>Jumlah Tesis</b>
1	Perkawinan	89
2	Perceraian	12
3	Gender	3
4	Formulasi hukum keluarga Islam	42
	Jumlah Total	146

---

<sup>8</sup> Buku Wisuda: Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020.

Masing-masing kecenderungan wacana tersebut jika didetailkan kembali maka akan nampak varian-varian wacana di dalamnya. Misalnya, dalam wacana seputar perkawinan, terdapat beberapa kecenderungan wacana atau tema kajian yang ditulis oleh para mahasiswa dalam penulisan tesis mereka. Di antaranya adalah tema kajian hak asuh anak, pola relasi dalam kehidupan rumah tangga, keluarga samawa, poligami, dan lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh judul tesis pada Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020:

Judul-Judul Tesis HKI	Tahun Wisuda
Perbedaan Penyebab Perceraian Wanita Bekerja dan Tidak Bekerja di Pengadilan Agama Yogyakarta 2013-2014	Periode 1 Tahun 2016-2017
Kafa'ah: Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis	
Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir: Studi Perbandingan	
Hukum Nikah Misyar Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	
Metode Penemuan Hukum dalam Perkara Dispensasi Nikah: Studi di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015	
Menakar Maslahat Kawin Gantung Dalam Konstruksi Fikih Dan Hukum Negara (Studi Atas Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyyah Waqi'iyah Mukhtamar Nahdaltul Ulama XXXII 2010 Di Makasar)	Priode I Tahun 2017-2018
Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Pada Anggota Jama'ah Tabligh Daerah Istimewa Yogyakarta)	
Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Katholik (Studi	

Komperativ Evaluative Di Kua Nglipar Dan Greja Kristus Raja Baciro)	
Tinjauan Masalah Terhadap Status Perkawinan Pasangan Non-Muslim Yang Masuk Islam	
Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara)	
Implementasi Biaya Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kota Dan Kabupaten Pekalongan)	
Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Tentang Tren Pengasuhan Anak Dan Tren Pembagian Peranan Di Kalangan Perempuan Yogyakarta)	Periode II Tahun 2018/2019
Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)	
Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Perkawinan Di Kabupaten Bangkalan Madura	
Kedudukan Doi Menre Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan	
Dilema Istri Akibat Suami Poligami Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Pelabuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara)	
Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan Dikota Pariaman	Priode II Tahun 2019-2020
Hak Ex Officio Hakim Dan Kewenangan Hadhanah Terhadap Putusan Perceraian (Studi Empiris Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017)	

Konsep Pencarian Jodoh (Studi Pada Kelompok Islam Puritan Dan Moderat Dikabupaten Boyolali)	Priode I Tahun 2020-2021
Sanksi Pembtalaan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kecamatan Semin Kabupaten Gunung Kidul)	
Beda Agama Sebab Terhalang Waris Dalam (Tinjauan Teori Keadilan Jhon Rawls)	
Fenomena Nikah Yang Tidak Dicatatkan (Studi Kasus Di Kecamatan Rawa Lumbu Bekasi)	
Strategi Mediasi Penyelesaian Sengketa Kewarisan: Studi Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Yogyakarta	
Penyelesaian Sengketa Perkawinan Beda Agama Hindu Dan Islam (Studi Atas Tradisi Ngerorod Masyarakat Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali)	
Nalar Hukum Penghulu Tentang Ketentuan Hukum Islam Perwalian Dan Kesaksian Penyandang Disabilitas Dalam Pernikahan: Studi Di KUA Kota Malang	
Diskresi Hakim Dalam Pemenuhan Pembayaran Nafkah Oleh Suami Pasca Cerai (Studi Pengadilan Agama Di Yogyakarta)	

Selanjutnya, peta kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa Konsentrasi Hukum Ekonomi/Bisnis Syariah (HSE/HBS) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020 meliputi lima kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) fikih muamalah dan sengketa hukum ekonomi syariah, (2) hak kekayaan intelektual dan etika bisnis Islam, (3) zakat dan wakaf, (4) lembaga keuangan syariah, dan (5) analisis undang-undang/formulasi hukum ekonomi syariah.

Berikut adalah data pemetaan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HES dalam bentuk table.<sup>9</sup>

No	Kecenderungan Wacana	Jumlah Tesis
1	Fikih muamalah dan sengketa hukum ekonomi syariah	38
2	Hak kekayaan intelektual dan etika bisnis Islam	18
3	Zakat dan wakaf	23
4	Lembaga keuangan syariah	53
5	Analisis undang-undang/formulasi hukum ekonomi syariah	47
	Jumlah Total	179

Sebagaimana pada konsentrasi HKI, masing-masing kecenderungan wacana yang ada pada penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HES juga jika didetailkan kembali maka akan nampak varian-varian wacana di dalamnya. Misalnya, dalam wacana seputar perbankan syariah, terdapat beberapa kecenderungan wacana atau tema kajian yang ditulis oleh para mahasiswa dalam penulisan tesis mereka. Di antaranya adalah tema kajian perilaku moral hazard dan adverse selection pada lembaga perbankan, kartu kredit syariah, kontrak pembiayaan bank syariah dan lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh judul tesis pada Konsentrasi Hukum Ekonomi/Bisnis Syariah (HES/HBS) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020:

Judul-Judul Tesis HES/HBS	Tahun Wisuda
Studi Komparatif Perilaku Moral Hazard Dan Adverse Selection Pada Lembaga Perbankan Di Indonesia (Sebelum Dan Sesudah Adanya Sistem Penjamin Simpanan)	Periode 1 Tahun 2016-2017 Periode 1 Tahun 2016-2017 Periode 1 Tahun 2016-2017 Periode 1 Tahun 2016-2017 Periode 1 Tahun 2016-2017

<sup>9</sup> Buku Wisuda: Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020.



Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Diperbankan Syariah	
Pengaruh Kualitas Asset Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	
CO- Integration And Contagion Effect Pasar Modal Konvensional Dan Syariah Saat Gejolak Ekonomi China (Studi Kasus Asia Pasifik, China, Malaysia, Dan Indonesia)	
Kedalaman Jangkauan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Kabupaten Bantul Yogyakarta	
Hak Kebendaan Dalam Harta Pusaka Tinggi Minangkabau (Studi Di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok, Sumatra Barat)	
Pengaruh Tingkat Profitabilitas Dan Pengungkapan ICSR Terhadap Harga Saham Bank Syariah Di Kawasan Arab Teluk	
Analisis Perbandingan Efektivitas Kinerja Pengawasan Syariah Compliance (Studi Kasus DPS BMT Di DIY)	Priode I Tahun 2017-2018 Priode I Tahun 2017-2018 Priode I Tahun 2017-2018 Priode I Tahun 2017-2018
Pengaruh Analisis Keuangan Multi Dimensional Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia	Priode I Tahun 2017-2018
Pengaruh Kompetensi, Intergrasi, Dan Independensi Terhadap Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah Dan Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Bank	

Pembiayaan Rakyat Syariah Di Yogyakarta	
Konsep Islamic Corporate Governance Sebagai Tata Kelola Perusahaan Di Bakpia Djogja	Periode II Tahun 2018/2019
Tinjauan Program Distribusi Zakat Kepada Asnaf Fi Sabilillah Berdasarkan Maqasid Asy-Syariah: Kajian Di Baznas Kota Yogyakarta	
Tinjauan Saddu Dzari'ah Terhadap Prinsip 5c+1s Atas Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bprs Karya Mugi Sentosa Surabaya	Periode III Tahun 2018/2019 Periode III Tahun 2018/2019 Periode III Tahun 2018/2019 Periode III Tahun 2018/2019
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada Lembaga Bmt (Studi Kasus Di Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)	
Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Kasus Di Kota Denpasar Bali)	
Problematika Penerapan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia	Priode II Tahun 2019-2020 Priode II Tahun 2019-2020 Priode II Tahun 2019-2020 Priode II Tahun 2019-2020 Priode II Tahun 2019-2020
Problematika Penerapan Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Indonesia	
Tinjauan Islam Terhadap Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Gunung Sitember	Priode II Tahun 2019-2020

Analisis Hukum Bisnis Syariah Kemitraan Go-Food Dalam Kemitraan Dan Pengguna Go-Jek (Studi Kasus Dikota Yogyakarta)	
Tata Kelola Koin NU Prespektif Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Pengelolaan Koin NU Di Kabupaten Bantul)	
Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Di Pengadilan Negeri Prespektif Perma No 14 Tahun 2016	
Analisis Kontribusi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2019	
Legalitas Formil Dan Legalitas Substantif Lembaga Amil Zakat Tradisional (Studi Kasus Di Baitul Maal Masjid Jogokaryan Yogyakarta)	Priode I Tahun 2020-2021 Priode I Tahun 2020-2021
Penetapan Upah Sepihak Oleh Petani Terhadap Buruh Tani Perempuan Di Kampong Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan-Lampung	Priode I Tahun 2020-2021 Priode I Tahun 2020-2021 Priode I Tahun 2020-2021
Pembatasan Hak Ex-Efficio Hakim Terhadap Hadhanah Dalam Sema No 3 Tahun 2015 Dan Sema No 3 Tahun 2018	
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1A	

Dalam Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah	
--	--

Sementara peta kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020 meliputi empat kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) organisasi/Ormas, (2) lembaga pemerintahan, (3) analisis undang-undang/pidana, dan (4) politik/fikih siyasah. Berikut adalah data pemetaan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HTN dalam bentuk table.<sup>10</sup>

No	Kecenderungan Wacana	Jumlah Tesis
1	Organisasi/Ormas	7
2	Lembaga pemerintahan	4
3	Analisis undang-undang/pidana	20
4	Politik/fikih siyasah	15
	Jumlah Total	46

Pada konsentrasi HTN ini juga sama dengan konsentrasi HKI dan HES/HBS, masing-masing kecenderungan wacana yang ada pada penulisan tesis mahasiswa konsentrasi HTN juga jika didetailkan kembali maka akan nampak varian-varian wacana di dalamnya. Misalnya, dalam wacana seputar etika politik, terdapat beberapa kecenderungan wacana atau tema kajian yang ditulis oleh para mahasiswa dalam penulisan tesis mereka. Di antaranya adalah tema kajian transformasi politik dan etika kekuasaan, politik kebangsaan, peran politik perempuan, hak politik mantan terpidana dan lainnya.

Berikut adalah beberapa contoh judul tesis pada Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020:

---

<sup>10</sup> Buku Wisuda: Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020.

Judul-Judul Tesis HTN	Tahun Wisuda
Transformasi Politik Pembangunan Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo Sungai Batang Riau	Periode II Tahun 2016-2017
Transformasi Social Keagamaan Keluarga Mahasiswa Nahdatul Ulama (KMNU) Di Universitas Negri Yogyakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
Konsep Mamlukah Dan Keharusan Masalah Dalam Etika Kekuasaan Raja Ali Kelana 1849-1927	Periode IV Tahun 2016-2017
Aspirasi Keagamaan Aktivis Islam Muda HTI Di Perguruan Tinggi Islam Surakarta	Periode IV Tahun 2016-2017
Transformasi Politik Pembangunan Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo Sungai Batang Riau	Periode IV Tahun 2016-2017
Transformasi Identitas Islam Pasca Pembentukan Provinsi Gorontalo	Priode I Tahun 2017- 2018
Islam Puritan Dan Konteks Demokrasi Di Indonesia (Studi Atas Gerakan Dakwah Salafi Di Kota Tanjung Pinang)	Priode I Tahun 2017- 2018
Wacana Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)	Priode I Tahun 2017- 2018 Priode I Tahun 2017- 2018 Priode I Tahun 2017- 2018

Muslimat Dalam Kancah Politik (Studi Affirmative Action Terhadap Anggota Parlemen Perempuan Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2019)	
Pemikiran Emha Ainun Najib Terhadap Isu-Isu Politik Kebangsaan Actual Di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Aksi 212, Fenomena Penolakan Pemimpin Non-Muslim Dan Wacana Kriminalisasi Ulama)	
Tolak Ukur Kinerja Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Terhadap Pelayanan Publik Di Provinsi Lampung Dalam Tinjauan Maqasid Al-'Ammah	Periode II Tahun 2018/2019 Periode II Tahun 2018/2019
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta)	
Analisis Ketentuan Zona Industri Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 58 Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Periode III Tahun 2018/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Dalam Perspektif Maqasid Syariah	Periode IV Tahun 2018/2019

Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim Di Indonesia	Periode IV Tahun 2018/2019
Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Korupsi (Perspektif Penemuan Hukum Dan Maqasid	Periode I Tahun 2018/2019 Periode I Tahun 2018/2019 Periode I Tahun 2018/2019
Masa jabatan anggota legislative dalam uu NO 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum prespektif siyash dusturiyyah tasriyyah	
Tinjauan siyash dusturiyyah dan good governance dalam implementasi pasal 69 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 28 tahun 2018 dikota salatiga	
Diskursus Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Yudi Latif Melalui Critical Discourse Analisis Dan Implementasinya Bagi Pembentukan Islam Governance	
	Priode II Tahun 2019-2020
Calon Independen Dan Kualitas Pilkada Pascareformasi Dalam Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021 Priode I Tahun 2020-2021
Implementasi Perda Jumat Khususu' Di Bima (Analisis Perda Kabupaten Bima Nomer 4 Tahun 2013	
	Priode I Tahun 2020-2021

Nilai Kemaslahatan Kewenangan Komisi Yudisial Di Indonesia	Priode I Tahun 2020-2021
Perbedaan Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Analisis Maqosid Syariah)	Priode I Tahun 2020-2021
Implementasi Frase UUD 1945 18b Ayat (2) Dan Pasal 281 Ayat (3) Pada Masyarakat Adat Betawi (Studi Teori Masalah Mursalah)	

### Relevansinya dengan Kompetensi Program Studi

Menurut M. Atho Mudzhar, adanya kajian ilmu-ilmu Syari'ah di perguruan tinggi dapat menjadi salah satu barometer tentang bagaimana ilmu-ilmu Syari'ah itu secara konseptual telah dikembangkan dan secara dinamis telah merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Itulah pentingnya terus mencermati pengajaran ilmu-ilmu Syari'ah di perguruan tinggi.<sup>11</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka sangat penting untuk melihat bagaimana relevansi tema-tema kajian dalam kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sepanjang tahun 2016-2020 terutama relevansinya dengan kompetensi Program Studi Magister Ilmu Syariah itu sendiri, yakni dari segi kesesuaiannya dengan visi, misi, dan tujuan program studi.

Visi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah: *Unggul dan terkemuka dalam pengembangan keilmuan hukum Islam untuk kemajuan peradaban.*<sup>12</sup>

Misi Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan

<sup>11</sup> M. Atho Mudzhar, "Kajian Ilmu-Ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi: Sudahkah merespon Tuntutan Masyarakat?", *Asy-Syirab: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012, hlm. 369.

<sup>12</sup> Profil Kurikulum Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020, hlm. 1



pengajaran S-2 dalam ilmu hukum Islam yang berwawasan integrasi dan interkoneksi.

2. Mengembangkan penelitian ilmu hukum Islam secara interdisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
3. Meningkatkan peran serta program studi dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu hukum Islam bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan.
4. Mengembangkan jaringan kerja sama program studi Magister Hukum Islam dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.<sup>13</sup>

Tujuan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

1. Melahirkan Sarjana Magister Hukum dengan penguasaan keilmuan yang integratif-interkoneksi, transformatif, dan multikultural, serta profesional dan berkepribadian luhur yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat.
2. Menjadi pusat kajian ilmiah dan penelitian dalam pengembangan hukum Islam yang konstruktif bagi kemajuan masyarakat.
3. Menjadi program studi yang memiliki jaringan kerjasama yang luas dan fungsional dalam skala lokal, nasional dan internasional.<sup>14</sup>

Visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di atas jika dikaitkan dengan data penulisan tesis mahasiswa sepanjang tahun 2016-2020, maka ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan guna ketercapaian kompetensi program studi melalui tema-tema kajian penulisan tesis mahasiswa.

1. Masih ditemukannya beberapa kajian tesis yang mengulang tema-tema kajian sebelumnya. Misalnya pada konsentrasi hukum keluarga Islam, tema kajian kafa'ah, nikah beda agama, nikah misyar, dan lainnya terdapat beberapa kesamaan baik dari segi redaksi judul tesis maupun fokus kajiannya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

2. Kajian-kajian studi kasus dan studi lapangan memang cukup banyak dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun demikian, perlu diperhatikan tingkat kedalaman analisis dan penggunaan teori-teori dalam kajian ilmu syariah sebagai core keilmuannya.
3. Berbeda dengan studi kasus dan studi lapangan, kajian studi tokoh nampaknya masih minim dalam kecenderungan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Padahal, studi tokoh dan pemikirannya dalam bidang kajian ilmu syariah sangatlah penting guna pengembangan ilmu-ilmu syariah itu sendiri.

### **Korelasinya dengan Pemahaman Teoritik**

Aspek ketrampilan khusus dalam capaian pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

1. Mampu dan mahir dalam berpikir yuridis-normatif yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum (*istinbath*) untuk memecahkan kasus-kasus hukum.
2. Mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional.
3. Mampu melakukan evaluasi sistem hukum nasional Indonesia dan aspek lain dalam studi hukum sesuai dengan studi hukum Islam dan perkembangan hukum untuk disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat.
4. Mampu dan mahir dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di dalam maupun di luar pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras

dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.<sup>15</sup>

Aspek yang paling terkait dengan penelitian ini adalah aspek kedua, yaitu “mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional”. Dalam aspek ini disebutkan: “...menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional”.

Jika pernyataan dalam aspek tersebut dikaitkan dengan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa sepanjang tahun 2016-2020 maka bisa dikatakan kajian tema ini masih sangat minim. Kalau pun ada hanya sebatas memperbandingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan negara lain. Misalnya, pada tahun 2016 ditemukan satu-satunya tesis dengan judul: “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir: Studi Perbandingan”. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teoritik terkait dengan aspek ketrampilan khusus mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditingkatkan kembali pada masa-masa ke depan.

## Kesimpulan

Beberapa poin kesimpulan yang dapat dirumuskan terkait dengan pemetaan wacana syariah dan HAM dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, hasil penelusuran terhadap data-data tesis mahasiswa tahun 2016-2020 yang ditulis oleh para mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menunjukkan bahwa kecenderungan wacana ilmu syariah yang ada dalam penulisan tesis mahasiswa tersebut sangat beragam sesuai dengan ruang lingkup masing-masing konsentrasi yang

---

<sup>15</sup> Profil Kurikulum Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020, hlm. 7.

ada. Namun demikian, jika ditelaah lebih mendalam dari masing-masing kajian tesis mahasiswa tersebut, maka ada beberapa kecenderungan wacana yang dapat disimpulkan. Misalnya, pada Konsentrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) meliputi empat kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) gender, dan (4) formulasi hukum keluarga Islam. Pada Konsentrasi Hukum Ekonomi/Bisnis Syariah (HSE/HBS) meliputi lima kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) fikih muamalah dan sengketa hukum ekonomi syariah, (2) hak kekayaan intelektual dan etika bisnis Islam, (3) zakat dan wakaf, (4) lembaga keuangan syariah, dan (5) analisis undang-undang/formulasi hukum ekonomi syariah. Sementara pada Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) meliputi empat kecenderungan wacana, yakni wacana seputar (1) organisasi/Ormas, (2) lembaga pemerintahan, (3) analisis undang-undang/pidana, dan (4) politik/fikih siyasah.

*Kedua*, Peta kecenderungan wacana dalam penulisan tesis mahasiswa di atas, jika dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan guna mengukur ketercapaian kompetensi program studi melalui tema-tema kajian penulisan tesis mahasiswa tersebut. Misalnya, masih ditemukannya beberapa kajian tesis yang mengulang tema-tema kajian sebelumnya. Misalnya pada konsentrasi hukum keluarga Islam, tema kajian kafa'ah, nikah beda agama, nikah misyar, dan lainnya terdapat beberapa kesamaan baik dari segi redaksi judul tesis maupun fokus kajiannya. Kajian-kajian studi kasus dan studi lapangan memang cukup banyak dalam penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun demikian, perlu diperhatikan tingkat kedalaman analisis dan penggunaan teori-teori dalam kajian ilmu syariah sebagai core keilmuannya. Berbeda dengan studi kasus dan studi lapangan, kajian studi tokoh nampaknya masih minim dalam kecenderungan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Padahal, studi tokoh dan pemikirannya dalam bidang kajian ilmu syariah sangatlah penting guna pengembangan ilmu-ilmu syariah itu sendiri.

*Ketiga*, Salah satu aspek ketrampilan khusus dalam capaian pembelajaran pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah “mampu dan mahir dalam melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum Islam dan/atau hukum umum, atau menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional”. Dalam aspek ini disebutkan: “...*menemukan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional*”. Jika pernyataan dalam aspek tersebut dikaitkan dengan kecenderungan wacana penulisan tesis mahasiswa sepanjang tahun 2016-2020 maka bisa dikatakan bahwa kajian tema ini masih sangat minim. Kalau pun ada hanya sebatas memperbandingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan negara lain. Misalnya, pada tahun 2016 ditemukan satu-satunya tesis dengan judul: “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Mesir: Studi Perbandingan”. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teoritik terkait dengan aspek ketrampilan khusus mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditingkatkan kembali pada masa-masa ke depan.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: AKAPRES, 1995
- Ahmad Mohamed Ibrahim dan Abdul Munir Yaacob, (eds.), *The Administration of Islamic Laws*. Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia [IKIM], 1997.
- Akh. Minhaji, “Orientasi Kajian Ushul Fiqh”, *al-Jami’ah*, No. 63 (1999).
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

- Buku Wisuda: Sarjana, Magister, dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2020.
- DPPM-DIKTI, *Materials for Workshop on International Scientific Paper Writing*, Jakarta: DPPM DIKTI, 2010.
- Faruq Abu Zaid, *asy-Syari'ah al-Islamiyah baina al-Mubafizhin wa al-Mujaddidin*, Kairo: Dar at-Taufiq al-'Arabi, t.t.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-3 Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985.
- <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1126/1005>.
- Husein Muhammad, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Islam" dalam Tim PSW, *Modul Pelatihan Hak-Hak dalam Keluarga*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan The Asia Foundation, 2009.
- Husein Muhammad, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" dalam Tim PSW, *Modul Pelatihan Hak-Hak dalam Keluarga*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga kerjasama dengan The Asia Foundation, 2009.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khoiruddin Nasution dan Mansur (ed.), *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Antara Aras Idealitas dan Realitas*, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.
- Khoiruddin Nasution, dkk., *Pengantar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Laurie J. Sears, (ed.), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, Durham & London: Duke University Press, 1996.
- Lukman, *Manajemen Pengelolaan Jurnal: Evaluasi Sesuai Akreditasi Nasional*, 2015.
- Mahmûd Syaltût, *Al-Islâm: 'Aqîdah wa Syari'ah*, Beirût & Kairo: Dâr al-Syurûq, 1983 M/1403 H.

- Mansur, “Dekonstruksi Tafsir Poligami: Mengurai Dialektika Teks dan Konteks”, dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2008: P. 31-64.
- Mark Cammack, Lawrence A. Young dan Tim Heaton, “Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia’s Marriage Law”, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 44, (1996).
- Mohammad Zahid, “Dua Dasawarsa Undang-undang Perkawinan” *DIALOG: Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan*, Badan Peneliti dan Pengembangan Agama Depag., No. 39, Th. XVIII, Maret 1994.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Mudzhar, M. Ato, “Kajian Ilmu-Ilmu Syariah di Perguruan Tinggi: Sudahkah merespon Tuntutan Masyarakat?”, *Asy-Syirâh: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Muhammad Jawâd Mughniyah, *al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Khamsah*, Cet. Ke-9Beirût: Dâr al-Tiyâr & Dâr al-Jawâd, 1992, II.
- Muhammad Nur Yasin Ms., “Seputar Usulan Revisi UU Perkawinan”, *Jawa Pos (Radar Yogya)*, tanggal 19, 20 dan 21 Oktober 2000.
- Mustâfâ Ahmad al-Zarqâ, *al-Fiqh al-Islam fî Thaubibi al-Jadîd: al-Madkhal al-Fiqh al-‘Âmm*, Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.
- Profil Kurikulum Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

*Style Manual Committee Council of Science Editors 2006. Scientific Style and Format: The CSE Manual for Authors, Editors, and Publishers. Reston VA: Council of Science Editors, Inc. & The Rockefeller University Press.*

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXI, Jakarta: PT. Intermedia, 1987.

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.

Tim Pokja Akademik, *Kompetensi Program Studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Tim Pokja Akademik UIN Suka, 2006.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, VI.